

**KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG
PENGESEAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN
PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR:217/G/2014/PTUN-JKT).

Oleh:

KHUSNUL KHOTIMAH

E1A011007

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara tolok ukur keabsahan KTUN yakni peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Salah satu kasus mengenai permasalahan keabsahan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT. Peneliti tertarik meneliti keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta mengenai akibat hukum atas dibatalkannya Surat Keputusan objek sengketa terhadap keabsahan Pengesahan Kepengurusan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode pendektan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan model intepretasi.

Adapun akibat hukum dibatalkannya Surat Keputusan objek sengketa bahwa Surat Keputusan objek sengketa masih tetap dianggap sah menurut hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang telah inkrah yang membatalkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut.

Kata Kunci: Keabsahan KTUN, Aspek Wewenang, Pembatalan dan Akibat hukum.

VALIDITY OF THE DECREE BY THE MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS ABOUT ENDORSEMENT OF CHANGES IN COMPOSITION OF THE MANAGEMENT OFFICE OF *PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN*

(VERDICT STUDY NUMBER:217/G/2014/PTUN-JKT).

By:

KHUSNUL KHOTIMAH

E1A011007

ABSTRACT

This research describes about the validity of an administrative decision as benchmark the validity of KTUN and it is the legislation and the General Principles of Good Governance. One of the cases concerning the validity issue of KTUN is in the Jakarta Administrative Court Decision No. 217 / G / 2014 / PTUN-JKT. Researcher is interested in examining the validity of the Decree of the disputed object from the authority aspect, procedures and General Principles of Good Governance, and the legal consequences for the cancellation of the Decree of the disputed object toward the validity of Ratification Stewardship Leadership Political Parties.

This research uses juridical normative method by using law and cases approach. The analysis method uses qualitative method by interpretation.

The result of the cancellation of the law for the Decree of disputed object is still legally valid before the court cancels the Decree of the disputed objects.

Keywords: KTUN validity, the authority aspect, Cancellation and legal consequences.